



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Pada perkembangan selanjutnya, Pangeran Walangsungang, putra Prabu Siliwangi ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan gelar Cakrabumi. Pangeran inilah yang mendirikan Kerajaan Cirebon, diawali dengan tidak mengirimkan upeti kepada Raja Galuh. Oleh Raja Galuh dijawab dengan mengirimkan bala tentara ke Cirebon untuk menundukkan Adipati Cirebon, namun ternyata Adipati Cirebon terlalu kuat bagi Raja Galuh sehingga ia keluar sebagai pemenang.

Dengan demikian berdirilah kerajaan baru di Cirebon dengan Raja bergelar Cakrabuana. Berdirinya kerajaan Cirebon menandai diawalnya Kerajaan Islam Cirebon dengan pelabuhan Muara Jati yang aktivitasnya berkembang sampai kawasan Asia Tenggara.

Riwayat Pemerintahan Kota Cirebon sebagai berikut :

1) Periode Tahun 1270-1910

Pada abad XIII Kota Cirebon ditandai dengan kehidupan yang masih tradisional dan pada tahun 1479 berkembang pesat menjadi pusat penyebaran dan Kerajaan Islam terutama di wilayah Jawa Barat. Kemudian setelah penjajah Belanda masuk, dibangunlah jaringan jalan raya darat dan kereta api sehingga mempengaruhi perkembangan industri dan perdagangan.

2) Periode Tahun 1910-1937

Pada periode ini Kota Cirebon disahkan menjadi Gemeente Cheirebon dengan luas 1.100 Hektar dan berpenduduk 20.000 jiwa (Stlb. 1906 No. 122 dan Stlb. 1926 No. 370).

3) Periode Tahun 1937-1967

Tahun 1942 Kota Cirebon diperluas menjadi 2.450 hektar dan tahun 1957 status pemerintahannya menjadi Kota Praja dengan luas 3.300 hektar, setelah ditetapkan menjadi Kotamadya tahun 1965 luas wilayahnya menjadi 3.600 hektar.

4) Periode Tahun 1967-Sekarang

Wilayah Kota Cirebon sampai saat ini seluas 3.735,82 hektar. Terbagi dalam 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Adapun nama-nama yang pernah memimpin Kota Cirebon dari zaman Belanda sampai dengan saat ini sebanyak 24 orang diantaranya adalah Walikota Drs. H. Ano Sutrisno, MM. (2013 – sekarang).

2.1.2 Visi Pemerintah Kota Cirebon

Terwujudnya Kota Cirebon yang RAMAH (Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau)

2.1.3 Misi Pemerintah Kota Cirebon

Guna terwujudnya Kota Cirebon yang RAMAH, misi yang harus dijalankan, yaitu :

- 1) Mewujudkan aparatur pemerintah dan masyarakat Kota Cirebon yang Religius.
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparatur dan revitalisasi kelembagaan pemerintah kota yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Cirebon pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang berbasis pada budaya dan kearifan lokal.
- 4) Meningkatkan peran serta unsur masyarakat dalam pembangunan.
- 5) Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup.



UMN

- Sembilan bintang berwarna putih
- c) Warna Dasar Lambang adalah Berwarna Hitam yang Menghiasi Perisai dan Pita
- d) Arti dan Lambang Daerah

Lambang daerah yang dilukiskan dalam tata warna sebagai mana yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 1989 sebagai berikut:

(1) Daun jati yang berwarna hijau tua, mengandung arti bahwa pada zaman dahulu di Cirebon ada seorang pemimpin para wali yang berbudi luhur dan bertahta serta disemayamkan di Gunungjati yang menyebarkan Agama Islam di Tanah Jawa

(2) Sembilan buah bintang berwarna putih, mengandung arti Walisangaan. Kota Cirebon terkenal sebagai tempat berkumpulnya para wali untuk bermusyawarah dalam hubungannya dengan ilmu Agama Islam yaitu:

- 4 (empat) buah bintang diatas dasar kuning emas menggambarkan ilmu syariat, hakekat, terekat dan ma'rifat
- 5 (lima) buah bintang di dalam gambar daun jati menggambarkan rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji

(3) Lukisan laut berombak berwarna biru, mengandung arti bahwa masyarakat Kota Cirebon mempunyai kegiatan bekerja di daerah pantai (nelayan), dengan penuh keikhlasan (jalur putih) dalam menunaikan kewajiban masing-masing untuk kepentingan bangsa dan negara

(4) Gambar udang rebon berwarna kuning emas, mengandung arti bahwa hasil laut telah memberikan kemakmuran kepada masyarakat Cirebon. Adapun

udang rebon merupakan bahan baku untuk pembuatan terasi yang terkenal dari Kota Cirebon

- (5) Garis bergerigi sembilan buah berwarna hitam yang melukiskan benteng yang mendatar berpuncak sembilan buah, menggambarkan arti bahwa Kota Cirebon bercita-cita melaksanakan pembangunan di segala bidang/sector di seluruh kotanya untuk kemakmuran rakyat
- (6) Perisai yang bersudut lima, mengandung arti bahwa perjuangan dalam mempertahankan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945
- (7) Warna dasar kuning emas perisai bagian atas melambangkan Kota Cirebon sebagai kota pantai yang bercita-cita melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, tentram, adil dan makmur.
- (8) Warna putih pada perisai bagian bawah melambangkan Kota Cirebon letaknya di pinggir laut atau Kota Pantai yang siap sedia (jalur biru) memberikan hasil laut yang berguna dan berharga bagi kehidupan rakyatnya
- (9) Pita melingkari perisai dengan warna kuning melambangkan persatuan, kebesaran dan kejayaan.
- (10) Dasar lambang yang berwarna hitam melambangkan keabadian

2.1.4.1 Motto Daerah

Motto Daerah yang merupakan semboyan kerja adalah Gemah Ripah Loh Jinawi, yang bermakna:

1. Pengertian Bahasa

Gemah Ripah berarti negara jembar serta banyak rakyatnya; Loh Jinawi artinya subur makmur

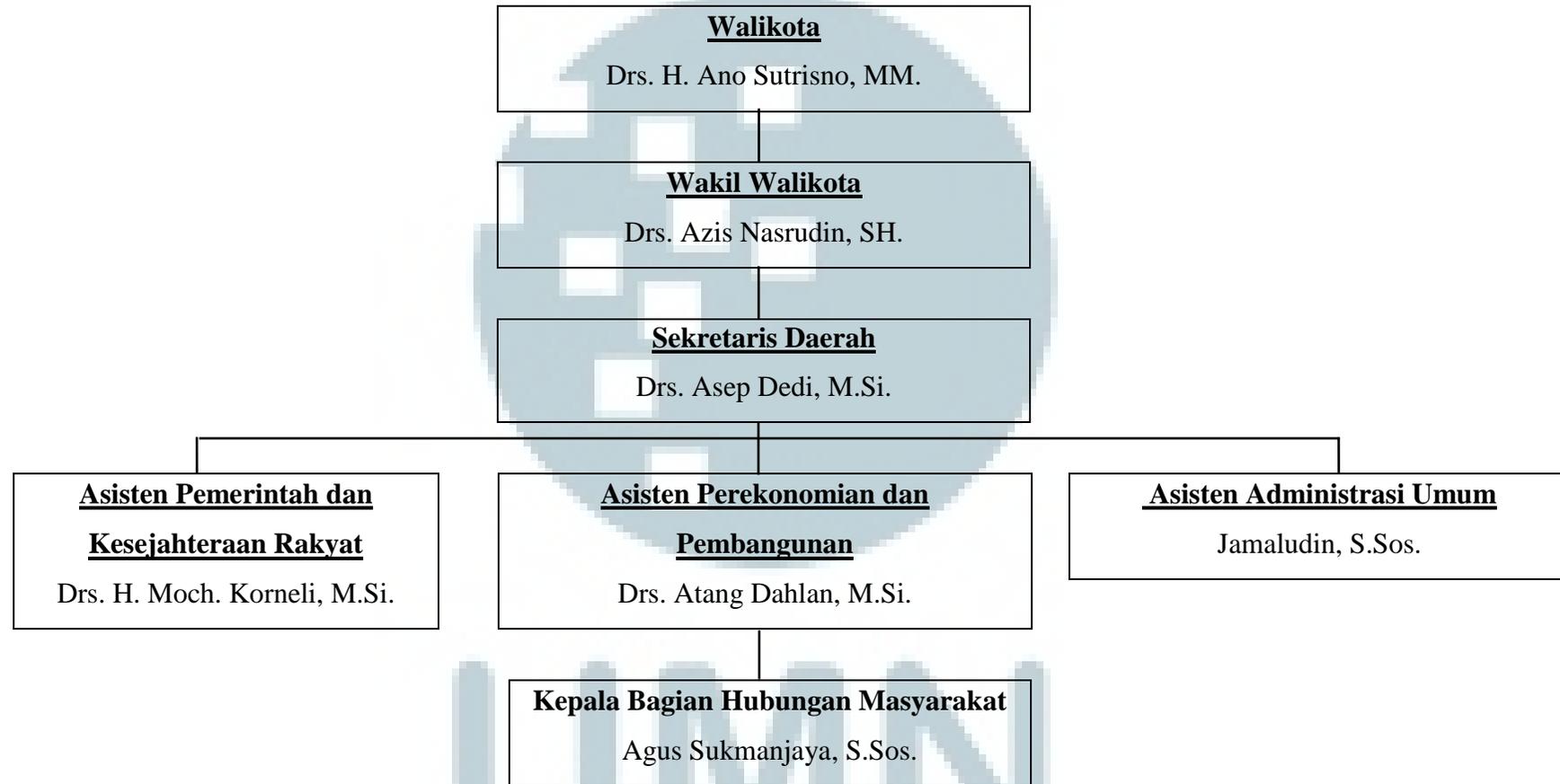
2. Pengertian Keseluruhan

Gemah Ripah Loh Jinawi adalah perjuangan masyarakat sebagai bagian bangsa Indonesia bercita-cita menciptakan ketentraman/perdamaian, kesuburan, keadilan, kemakmuran, tata raharja serta mulia abad.



UMN

2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Cirebon



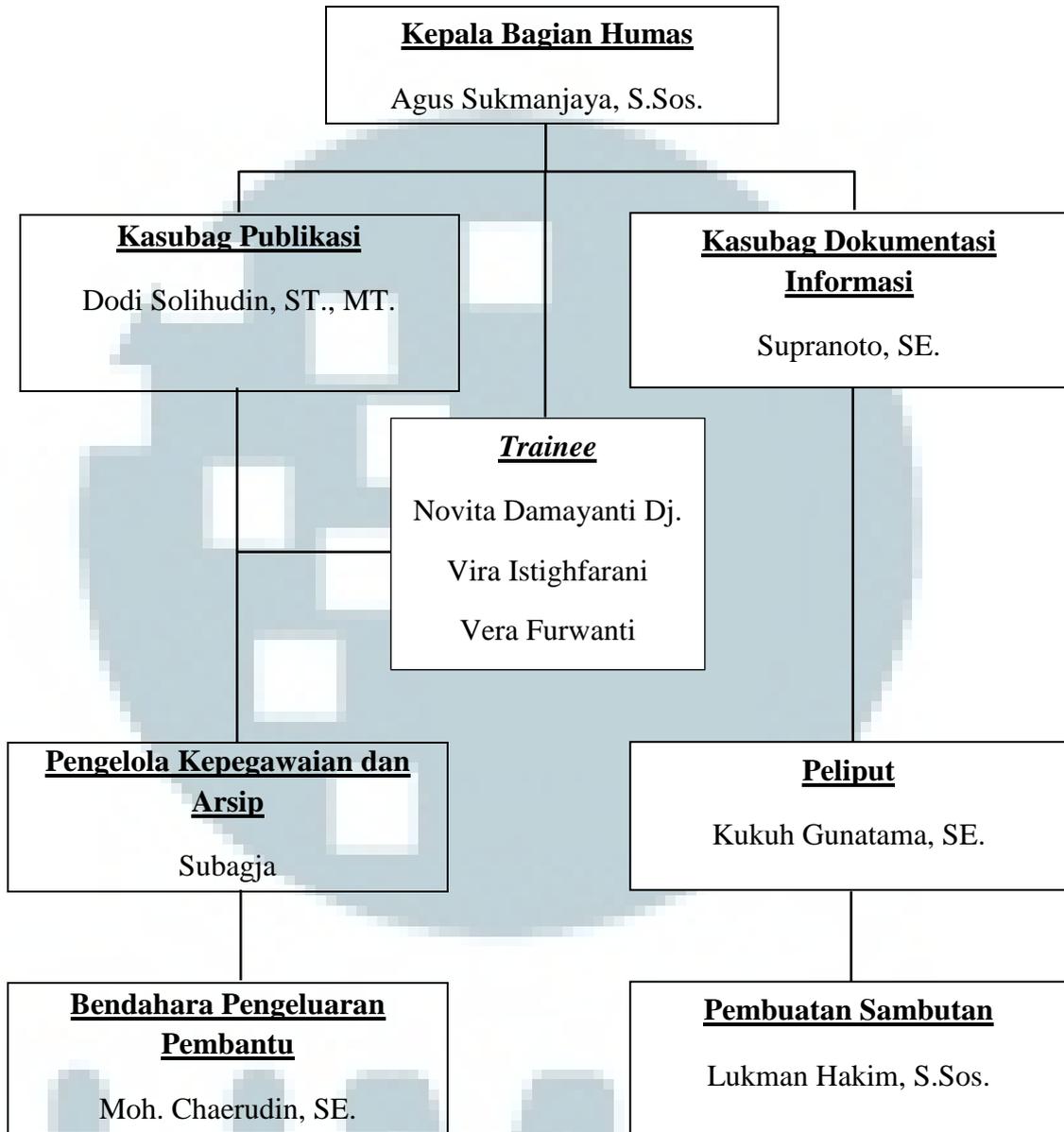
Bagan 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Cirebon

Sumber : Humas Pemerintah Kota Cirebon 2014



UMN

2.2.1 Struktur Divisi Humas Pemerintah Kota Cirebon



Bagan 2.2 Struktur Divisi Humas Pemerintah Kota Cirebon

Sumber : Humas Pemerintah Kota Cirebon 2014

2.2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait

Dalam Kehumasan Pemerintah Kota Cirebon, Humas memiliki pedoman dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kota Cirebon, yaitu:

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas

Dasar hukum pelaksanaan tugas Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon adalah :

- 1) Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik.
- 3) Undang – Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- 6) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon dan Keputusan Walikota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon.

7) Peraturan Walikota Cirebon Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kehumasan

Dalam Kehumasan Pemerintah Kota Cirebon memiliki dua Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Publikasi dan Sub Bagian Dokumentasi Informasi. Dimana masing-masing Sub Bagian tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, yakni:

1) Sub Bagian Publikasi

a) Tugas Pokok

Sub Bagian Publikasi Informasi sebagai pembantu teknis penyelenggaraan tugas unsur staf atau administrasi mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional penyelenggaraan menyusun rumusan kebijakan, monitoring evaluasi, melaksanakan pembinaan administratif dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi serta informatika.

b) Fungsi :

(1) Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Publikasi Informasi;

(2) Pemberian petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan menyusun rumusan kebijakan, monitoring evaluasi, melaksanakan pembinaan administratif dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Bagian Publikasi Informasi dan Informatika;

(3) Pembagian tugas pelaksanaan Sub Bagian Publikasi Informasi;

- (4) Pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Publikasi Informasi;
- (5) Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan menyusun rumusan kebijakan, monitoring evaluasi, melaksanakan pembinaan administratif dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi serta informatika;
- (6) Pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bagian Publikasi Informasi;
- (7) Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
- (8) Pelaporan pelaksanaan tugas-tugas Sub Bagian Publikasi Informasi;
- (9) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Dokumentasi Informasi

a) Tugas Pokok

Sub Bagian Dokumentasi Informasi sebagai pembantu teknis penyelenggaraan tugas unsur staf atau administrasi mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, dan merencanakan kegiatan operasional penyelenggaraan menyusun rumusan kebijakan, monitoring evaluasi, melaksanakan pembinaan administratif dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan dokumentasi informasi.

b) Fungsi

- (1) Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Dokumentasi Informasi;

- (2) Pemberian petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan menyusun rumusan kebijakan, monitoring evaluasi, melaksanakan pembinaan administratif, mengoordinasikan pelaksanaan urusan Dokumentasi Informasi;
- (3) Pembagian tugas pelaksanaan Sub Bagian Dokumentasi Informasi;
- (4) Pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Dokumentasi Informasi;
- (5) Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan menyusun rumusan kebijakan, monitoring evaluasi, melaksanakan pembinaan administratif, mengoordinasikan pelaksanaan urusan Dokumentasi Informasi;
- (6) Pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bagian Dokumentasi Informasi;
- (7) Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
- (8) Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Dokumentasi Informasi; dan
- (9) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

2.2.2.1 Visi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon “Terwujudnya kehumasan yang professional dan akuntable tahun 2018“. Hal ini dalam upaya memberikan pelayanan profesional dan prima kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam visi Ramah (Religius, Aman, Aspratif, dan Hijau) tahun 2018 dan misi Kota Cirebon yakni meningkatkan kualitas

SDM menuju Kota Cirebon yang Sejahtera di tahun 2013 secara berkelanjutan.

2.2.2.2 Misi Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon

- 1) Menyusun dan Melaksanakan program dan kegiatan strategis kehumasan demi terciptanya citra pemerintahan yang *Good Government* dan *Good Governance*;
- 2) Menciptakan Manajemen Hubungan Masyarakat yang kredible dan profesional dalam rangka peningkatan pelayanan informasi;
- 3) Meningkatkan Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga, dilaksanakan dengan membangun hubungan koordinatif dan konsultatif antar satuan kerja dan praktisi kehumasan dengan satuan perangkat daerah lainnya, media massa dan lembaga masyarakat lainnya;
- 4) Meningkatkan pelayanan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mudah, cepat dan murah;
- 5) Mendokumentasikan kegiatan Pimpinan Daerah.

U M N

2.2.3 Program yang Dilakukan Oleh Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Cirebon

No	Program	Kegiatan				
		Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	
					Keluaran	Jumlah
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar dan	exemplar	6084	Rp. 665.100.000
			Tersedianya Majalah Warta Balaikota	exemplar	14000	
2	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	Dialog/Audiensi dengan Tokok-tokoh Masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan Sapa Warga	kegiatan	40	Rp. 499.719.000
3	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	Dokumentasi Manual dan Elektronik Pimpinan Daerah	Tersedianya Langganan TV Satelit	decoder	18	Rp. 3.194.355.000
			Baliho	lembar	10	
			Spanduk	lembar	25	
			DVD Profil	Keping	500	
			iklan media cetak	order	1	
			iklan media elektronik	order	1	
			kampanye bahaya merokok	kegiatan	1	

4	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Rapat Koordinasi antara PPID dan PPID Pembantu, serta Pelayanan Informasi Publik	Kegiatan	2	Rp. 94.071.000
---	---	----------------------------	--	----------	---	----------------

Tabel 2.1 Program yang Dilakukan Oleh Humas Pemerintah Kota Cirebon

Sumber : Humas Pemerintah Kota Cirebon 2014

UMMN

2.2.4 Daftar *Stakeholder* Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Cirebon

No.	Internal	No.	Eksternal
	Lingkungan Balaikota		Perusahaan
1	Walikota Cirebon	1	PT. KERETA API
2	Wakil Walikota Cirebon	2	PT. PLN
3	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	3	PT. TELKOM
4	Staf Ahli Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	4	PT. PELINDO
5	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5	TELKOMSEL
6	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	6	UDD PMI
7	Asisten Administrasi Umum	7	JIWASRAYA
8	Adm Pemerintahan Umum	8	AUTO 2000
9	Administrasi Kersa	9	GRAMEDIA
10	Adm. Kemasyarakatan	10	BBWS CIMANUK CISANGGARUNG
11	Perlengkapan Dan Keuangan	11	BULOG SUB DRIVE CIREBON
12	Adm. Pembangunan	12	CPDP WILAYAH CIREBON (SAMSAT)
13	Adm. Sumber Daya Alam	13	PROTOKOL
14	Adm. Perekonomian	14	PKK
	Instansi Pemerintah Kota Cirebon	15	Dharma Wanita
15	DPRD		Media Cetak
16	Sekretaris DPRD Kota Cirebon	16	Radar Cirebon
17	KODIM 0614	17	Kabar Cirebon
18	DANREM 063/iii/Siliwangi	18	Raykat Cirebon
19	DANDENPOM 3/iii/Siliwangi	19	Fajar Cirebon
20	Pengadilan Negeri	20	Pikiran Rakyat
21	Kejaksaan Negeri	21	Sindo Jabar
22	DANLANAL Cirebon	22	Inilah Koran
23	ARHANUDSE-14	23	Tempo
24	KKSOP Kelas Iii Cirebon	24	Media Indonesia
25	POLRES Cirebon Kota		Media Televisi Lokal
26	KPUD Cirebon	25	Cirebon TV
27	KODIM 0614	26	Radar Cirebon TV
28	BK-DIKLAT Kota Cirebon		Radio
29	Kepala Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	27	Cirebon FM 89,2
30	INSPEKTUR	28	Malala Radio 105,2 FM

31	BAPPEDA	29	RRI 97.5 FM
32	BPMPPKB	30	Pilar Radio 88,6 FM
33	BPMPP		Media Online
34	Dinas PUPESDM	31	cirebontrust.com
35	DINSOSNAKERTRANS	32	aboutcirebon.com
36	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	33	cirebonmedia.com
37	DISPORBUDPAR	34	rmol.com
38	Dinas Kesehatan		Bidang Usaha
39	RSUD Gunung Jati	35	Bentani Hotel
40	DKPPP	36	Prima Hotel
41	Dinas Perhubungan, Informasi Dan Komunikasi	37	Metland Hotel
42	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan	38	Amaris Hotel
43	DPPKD	39	Santika Hotel
44	Dinas Pendidikan	40	Cirebon Plaza
45	DISPERINDAGKOP DAN UMKM	41	Sidodadi Hotel
46	SATPOLPP	42	Zamrud Hotel
47	Kantor KESBANGPOLDN	43	Swiss Bell Hotel
48	Kantor Lingkungan Hidup	44	Hotel Tryas
49	Kantor Ketahanan Pangan	45	Bank Internasional Indonesia (BII)
50	Kantor Penanggulangan Bencana Dan Pem. Kebakaran	46	Bank Mandiri
51	PD Pasar	47	Bank Syariah Mandiri (BSM)
52	PD Air Minum	48	Bank CIMB Niaga
53	PD Bank Pasar	49	Bank Jabar
54	PD Farmasi	50	Bank Jabar Syariah
55	PD Pembangunan	51	Bank Artha Graha
56	BPJS ASKES	52	Bank Bukopin
57	BPJS JAMSOSTEK	53	Bank NISP
58	KNPI	54	Bank Rakyat Indonesia (BRI)
59	Seluruh Kecamatan & Kelurahan Kota Cirebon	55	Bank BRI Syariah
		56	BTPN

Tabel 2.2 Daftar *Stakeholder* Pemerintah Kota Cirebon

Sumber : Humas Pemerintah Kota Cirebon 2014